

PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA PADA ZAMAN PENJAJAHAN BELANDA DAN JEPANG

Subandi *¹

Program Doktor Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
Subandiabudzunnurain@gmail.com

Bahaking Rama

Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Andi Achruh

Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Abstract

Islamic education during the Dutch and Japanese occupation, that Islamic education during the Dutch colonial period in Indonesia, the Dutch colonial government severely limited the activities of madrasas and teachers who taught at madrasas. They do that because they are afraid of the Muslim Ummah which has started to develop. Meanwhile, when Japan was in power, Islamic education was slightly freer than during the Dutch colonial era. However, Japan, with its mission, required teachers to learn Japanese in giving lessons and changing Dutch to Indonesian, including requiring respect for the Tenno (Emperor). This is what the Islamic leaders did not accept, so they were eventually arrested.

Keywords: Islamic Education, Indonesia, Netherlands, Japan.

Abstrak

Pendidikan Islam masa pendudukan Belanda dan Jepang, bahwa Pendidikan pada Islam masa penjajahan Belanda di Indonesia, pemerintah kolonial Belanda sangat membatasi aktivitas madrasah dan guru yang mengajar di madrasah. Mereka melakukan itu karena perasaan takut terhadap Umat Islam yang sudah mulai berkembang. Sementara pada saat Jepang berkuasa pendidikan Islam sedikit lebih bebas ketimbang pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Akan tetapi Jepang dengan misinya, mewajibkan guru untuk belajar bahasa Jepang dalam memberikan pelajaran dan mengganti bahasa Belanda menjadi bahasa Indonesia, termasuk mewajibkan hormat kepada Tenno (Kaisar). Inilah yang oleh tokoh Islam tidak diterima akhirnya mereka ditangkap.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Indonesia, Belanda, Jepang.

PENDAHULUAN

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, umat Islam memainkan peran yang tidak terpisahkan, termasuk dalam perjuangan melawan penjajah. Sebagai mayoritas penduduk di negeri ini, umat Islam memiliki tanggung jawab moral untuk membangun

¹ Corresponding author.

dan mengatur negeri. namun, pada masa penjajahan, pemerintah kolonial tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap pendidikan Islam. Pendidikan Agama Islam tidak dimasukkan sebagai mata pelajaran utama di sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah penjajah.

Karena kurangnya perhatian tersebut, para tokoh Islam merasa perlu untuk mendirikan lembaga pendidikan Islam sebagai dasar pembangunan generasi Islam. Mereka mendirikan lembaga-lembaga yang di dalamnya membuka kesempatan bagi anak-anak Islam belajar agamanya melalui pengajian-pengajian tradisional dan ada juga yang sudah modern sebagai fondasi bagi pembangunan generasi Islam yang berkualitas (Harun Nasution, 1992).

Sebelum Belanda datang ke Indonesia dengan memperkenalkan sekolah-sekolah dan sistem modern sebagaimana berkembang di Barat, Indonesia sudah mempunyai sistem pendidikan formal yaitu sistem pendidikan . Sistem pendidikan Islam selaku satu-satunya pendidikan formal yang ada pada masa itu memiliki sistem dan pengelolaan tersendiri yang berbeda dengan sistem pendidikan yang dibawa oleh Belanda (Mahmud Yunus.1985).

Pendidikan di Indonesia selama penjajahan Belanda dapat dikelompokkan kedalam dua priode, yaitu periode VOC (*Vereenigde Oost-indische Compagnie*) dan periode pemerintah Hindia Belanda (*NederlandsIndie*). Pada periode VOC, pendidikan di Indonesia didasarkan pada prinsip bisnis yaitu berdasarkan untung rugi dalam hukum-hukum ekonomi. VOC tidak segan-segan untuk berperang bila ada yang menghalagi tujuan mereka. Ini bisa diperhatikan dari hak aktroinya yang terdapat dalam suatu pasal yang berbunyi: “Badan ini harus berniaga di Indonesia dan bila perlu boleh berperang. Dan harus memperhatikan agama Kristen dengan mendirikan sekolah (Arif Subhan, 2012). Hal ini menyebabkan terpecahnya pendidikan yang ada di Indonesia. Di satu pihak adanya jenis pendidikan dengan sistem pesantren dengan orientasi agama saja. Di pihak yang lain adanya pendidikan dengan sistem barat dengan orientasi sekuler yang tidak mempedulikan agama. Hal ini dikenal dengan sistem dikotomi pendidikan.

Perkembangan masyarakat Indonesia tentu tidak menguntungkan dengan pecahnya sistem pendidikan di Indonesia. Di satu sisi, diperlukan pemahaman terhadap perkembangan dunia luar menggunakan metode dan teknologi yang dikembangkan oleh Barat. Di sisi lain, penting juga memahami ajaran keagamaan sebagaimana yang telah ditanamkan sebelum VOC datang ke Indonesia. Munculnya madrasah-madrasah berkelas yang menggunakan bangku dan meja menjadi upaya memadukan kedua sistem ini, yang dipelopori oleh pembaharu di Indonesia.

Sikap pemerintah Belanda yang tak menginginkan Bangsa Indonesia maju dan berpendidikan. Kesempatan ini selalu dihambat dan dibatasi dengan maksud agar sebagian besar bangsa kita tetap dalam kebodohan agar kuku penjajahan Belanda semakin kokoh. Sikap Belanda yang demikian itu harus dilawan dengan memupuk

perasaan kebangsaan melalui organisasi. Pergerakan ini diawali dengan berdirinya perkampungan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 (Najamuddin. 2004).

Setelah Belanda ditaklukkan oleh Jepang di Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942, maka Belanda angkat kaki dari Indonesia semenjak itu mulailah penjajahan Jepang di Indonesia. Jepang muncul sebagai negara kuat di Asia, bangsa Jepang bercita-cita besar menjadi pemimpin Asia Timur Raya. Sejak tahun 1940 Jepang berencana untuk mendirikan kemakmuran bersama Asia Raya. Dalam rencana tersebut Jepang menginginkan menjadi pusat suatu lingkungan yang berpengaruh atas daerah-daerah masyuria, daratan Cina, kepulauan Filipina, Indonesia, Malaysia, Thailand.

Oleh karena itu rencana “kemakmuran bersama Asia Raya” dianggap sebagai suatu keharusan. Dengan semboyan “Asia untuk bangsa Asia” Jepang menguasai daerah yang berpenduduk lebih dari 400 juta jiwa yang antara lain menghasilkan 50% produksi karet dan 70% timah dunia. Indonesia yang kaya sumber bahan mentah merupakan sasaran yang perlu dibina dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan perang Jepang. Sehingga Jepang menyerbu Indonesia, karena tanah air Indonesia merupakan sumber bahan-bahan mentah yang kaya raya dan tenaga manusia yang banyak tersebut sangat besar artinya demi kelangsungan perang pasifik, dan hal ini sesuai pula dengan cita-cita politik ekspansinya (Zuhairini. 2011).

Kejayaan Jepang dalam perang pasifik menjadikan Indonesia sebagai bagian dari sasaran kolonialisme dengan betopeng pada semboyan Jepang cahaya Asia yang kedenagarannya bagus tapi di balik gerakan itu ternyata Jepang muncul sebagai bangsa Imperialis baru yang menambah penderitaan bangsa Indonesia. Terkhusus dalam bidang pendidikan Islam dengan segala pro dan kontranya pengaruh Jepang juga sangat dirasakan oleh bangsa Indonesia.

Maka berdasarkan latar belakang yang telah kami gambarkan di atas dalam artikel ini akan kami ulas sejarah pendidikan Islam di Indonesia pada masa penjajahan Belanda dan Jepang yang dirasakan membawa dampak yang cukup signifikan bagi perkembangan pendidikan Islam.

METODE PENELITIAN

Kajian dari penelitian ini menggunakan kajian literatur yang mana literatur yang diambil sesuai dengan pokok pembahasan dan di analisis secara mendalam sehingga dapat diambil kesimpulan dan temuan dalam penelitian. Literatur yang diambil baik dari buku, artikel jurnal baik nasional maupun internasional dan literatur lainnya (Hendriarto dkk., 2021); (Nugraha dkk., 2021); (Sudarmo dkk., 2021); (Hutagaluh dkk., 2020); (Aslan, 2017); (Aslan, 2019); (Aslan, 2016); (Aslan dkk., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Islam Pada Masa Belanda

Pemerintah Belanda mulai menjajah Indonesia pada tahun 1619 M, yaitu ketika Jan Pieter Coen menduduki Jakarta, dan dilawan oleh Sultan Agung Mataram yang bergelar Sultan Abdurrahman Khalifatullah Sayidin Panotogomo. Menurut Zuhairini, pada zaman Sultan ini, hitungan tahun Saka diasimilasikan dengan tahun Hijriyah yang berlaku di seluruh negara (Zuhairini. 2011).

Sejak zaman VOC, terutama ketika Van den Bosh menjadi Gubernur Jenderal di Jakarta pada tahun 1831, keluarlah kebijakan bahwa sekolah-sekolah gereja dianggap dan diperlukan sebagai sekolah pemerintah (Abdul Rachman Shaleh, 2004). Kebijakan ini bertujuan menanamkan nilai-nilai teologi Kristen terhadap anak-anak negara jajahan. Sebagaimana tujuan Barat menjelajah dan menaklukkan negara timur dengan konsep 3G, Golden, Glory dan Gospel. Golden artinya emas bermakna harta kekayaan. Glory artinya kemenangan dan kejayaan, dan gospel artinya agama Kristen.

Departemen yang mengurus pendidikan dan keagamaan dijadikan satu dan di tiap daerah karesidenan didirikan satu sekolah agama Kristen. Gubernur Jenderal Van den Capellen pada tahun 1819 M mengambil inisiatif merencanakan berdirinya sekolah dasar bagi penduduk pribumi agar dapat membantu pemerintah Belanda. Dalam surat edarannya kepada para Bupati tersebut sebagai berikut: “Dianggap penting untuk secepat mungkin mengadakan peraturan pemerintah yang menjamin meratanya kemampuan membaca dan menulis bagi penduduk pribumi agar mereka lebih mudah untuk dapat menaati undang-undang dan hukum negara.” (Zuhairini. 2011)

Jiwa dari surat edaran di atas menggambarkan tujuan daripada didirikannya sekolah dasar pada zaman itu. Pendidikan agama Islam yang ada di pondok-pondok pesantren, masjid, mushalla, dan lainnya dianggap tidak membantu pemerintah Belanda. Bahkan, para santri pondok pesantren masih dianggap buta huruf latin. Dengan demikian para santri tidak bisa memahami undang-undang yang telah dibuat.

Politik yang dijalankan oleh pemerintah Belanda terhadap bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam didasari oleh rasa ketakutan, rasa panggilan agamanya yaitu Kristen dan rasa kolonialismenya. Dengan begitu mereka menerapkan peraturan dan kebijakan sebagai berikut: (<https://journal.unismuh.ac.id>)

1. Pada tahun 1882 M pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang disebut “Priesterraden.” Atas nasihat dari badan inilah maka pada tahun 1905 M pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan yang isinya bahwa orang yang memberikan pengajaran (baca: pengajian) harus minta izin terlebih dahulu.
2. Pada tahun 1925 M pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan yang lebih ketat lagi terhadap pendidikan Islam, yaitu bahwa tidak semua orang (kyai) boleh memberikan pengajaran. Peraturan ini diberlakukan karena adanya gerakan organisasi pendidikan yang sudah tampak tumbuh, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Partai Syarikat Islam (PSI), Al-Irsyad, dan lain-lain.

3. Pada tahun 1932 M keluar pula peraturan yang memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak diberikan izin untuk memberikan pengajaran atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah Belanda yang disebut Ordonansi Sekolah Liar (*Wilde School Ordonantie*). Peraturan ini dikeluarkan setelah munculnya gerakan Nasionalisme-Islamisme pada tahun 1928 M, yaitu berupa Sumpah Pemuda.

Jika dicermati peraturan-peraturan pemerintah Belanda yang demikian ketat dan keras mengenai pengawasan, tekanan dan pemberantasan aktivitas madrasah dan pondok pesantren di Indonesia, maka seolah-olah dalam waktu yang tidak lama pendidikan Islam di Indonesia akan menjadi lumpuh dan porak poranda. Akan tetapi, apa yang disaksikan sejarah adalah kenyataan sebaliknya. Jiwa Islam tetap terpelihara dengan baik. Para ulama dan kyai bersikap *non cooperative* dengan Belanda dan mereka pun menyingkir dari tempat yang dekat dengan Belanda (Zuharini, 2011).

Pada masa kolonial Belanda pendidikan Islam di sebut juga dengan bumiputera, karena yang memasuki pendidikan Islam seluruhnya orang pribumi Indonesia. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda ada tiga macam, yaitu:

1. Sistem pendidikan peralihan Hindu Islam; Sistem ini merupakan sistem pendidikan yang masih menggabungkan antara sistem pendidikan Hindu dengan Islam. Sistem ini dilaksanakan dengan cara, guru mendatangi murid-muridnya. yang menjadi murid-muridnya adalah anak-anak para bangsawan dan kalangan keraton. Sebaliknya, sistem pertapa, para murid mendatangi guru ke tempat pertapaanya. adapun murid-muridnya tidak lagi terbatas pada golongan bangsawan dan kalangan keraton, tetapi juga termasuk rakyat jelata.
2. Sistem pendidikan surau (langgar) Sistem pendidikan di surau tidak mengenal jenjang atau tingkatan kelas, murid dibedakan sesuai dengan tingkatan keilmuannya, proses belajarnya tidak kaku sama muridnya (Urang Siak) diberikan kebebasan untuk memilih belajar pada kelompok mana yang ia kehendaki. Dalam proses pembelajaran murid tidak memakai meja ataupun papan tulis, yang ada hanya kitab kuning merupakan sumber utamanya dalam pembelajaran. Metode utama dalam proses pembelajaran di surau dengan memakai metode ceramah, membaca dan menghafal. Materi pembelajaran yang diberikan Syeikh kepada urang siak dilaksanakan sambil duduk di lantai dalam bentuk setengah lingkaran. Syeikh membacakan materi pembelajaran, sementara murid menyimakanya dengan mencatat beberapa catatan penting di sisi kitab yang dibahasnya atau dengan menggunakan buku khusus yang telah disiapkan oleh murid. Sistem seperti ini terkenal dengan istilah halaqoh.
3. Sistem Pendidikan Pesantren. Metode yang digunakan adalah metode sorogan, atau layanan individual yaitu bentuk belajar mengajar dimana Kiyai hanya menghadapi seorang santri yang masih dalam tingkatan dasar atau sekelompok kecil santri yang

masih dalam tingkatan dasar. Tata caranya adalah seorang santri menyodorkan sebuah kitab di hadapan kiyai, kemudian kiyai membacakan beberapa bagian dari kitab itu, lalu santri mengulangi bacaan sampai santri benar-benar membaca dengan baik. Bagi santri yang telah menguasai materi lama, maka ia boleh menguasai materi baru lagi. Metode wetonan dan bandongan, atau layanan kolektif ialah metode mengajar dengan sistem ceramah. Dalam metode ini kyai biasanya membacakan, menerjemahkan, lalu menjelaskan kalimat-kalimat yang sulit dari suatu kitab dan para santri menyimak bacaan kyai sambil membuat catatan penjelasan di pinggir kitabnya. Metode Musyawarah adalah belajar dalam bentuk seminar (diskusi) untuk membahas setiap masalah yang berhubungan dengan materi pembelajaran-pelajaran santri ditingkat tinggi. Metode ini menekankan keaktifan pada pihak santri, yaitu santri harus aktif mempelajari dan mengkaji sendiri buku yang telah ditentukan kiyainya. Kiyai harus menyerahkan dan memberi bimbingan seperlunya (Ramayulis, 2011).

Kurikulum Pesantren Menurut Karel A Steenbrink semenjak akhir abad ke-19 pengamatan terhadap kurikulum pesantren sudah dilakukan misalnya oleh LWC Van Den Berg (1886) seorang pakar pendidikan dari Belanda. Berdasarkan wawancaranya dengan para kiyai, dia mengkompilasi kitab kuning meliputi kitab-kitab fikih, baik fikih secara umum maupun fikih ibadah, tata bahasa Arab, ushuludin, tasawuf dan tafsir. Dari hasil penelitian Van De Berg tersebut, Karel A. Steenbrink menyimpulkan antara lain kitab-kitab yang dipakai di pesantren hampir semuanya berasal dari zaman pertengahan dunia Islam.

Pada umumnya pendidikan di pesantren mengutamakan pelajaran fikih. Namun sekalipun mengutamakan pelajaran fikih mata pelajaran lainnya tidak diabaikan sama sekali. Dalam hal ini mata pelajaran yang berhubungan dengan ilmu alat, pembinaan iman, dan akhlak sangat diperlukan. Pengajaran bahasa Arab adalah ilmu bantu untuk pemahaman kitab-kitab agama. Pengajaran bahasa Arab tersebut terdiri dari beberapa cabang dan tingkatan sebagai dasar bagi santri untuk melakukan pengajian kitab dengan begitu, santri harus memiliki pengetahuan bahasa Arab terlebih dahulu sebelum pengajian kitab yang sebenarnya dilaksanakan. Pengajian kitab yang dimaksudkan itu adalah pengajian fikih dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi. Kitab-kitab fikih tersebut ditulis dalam bahasa Arab (A Karel Steenbrink. 1984).

Awalnya pemerintah Belanda tidak begitu memperhatikan perkembangan pendidikan Islam, tetapi setelah melihat perkembangan lebih lanjut, seperti peningkatan jumlah madrasah dan sekolah-sekolah swasta sebagai institusi pendidikan di luar sistem persekolahan pemerintah, kalangan pemerintah semakin hati-hati terhadap sikap netral mereka selama ini. Masalah Islam yang menjadi sumber kekhawatiran pemerintah tersebut agaknya tidak terbatas adanya institusi pendidikannya saja.

Lebih jauh dari itu, mereka memandang kemungkinan pendidikan Islam tersebut memengaruhi sekolah-sekolah swasta lainnya. Adanya latar belakang tersebut pemerintah Belanda merubah sikapnya dalam menghadapi kemungkinan buruk yang bakal timbul dari peningkatan jumlah madrasah dan sekolah-sekolah agama. Sebagai tindakan pencegahan, dikeluarkan ordonansi tanggal 28 Maret 1932 Lembaran Negara no 136 dan 260 isinya berupa pembatasan kebebasan mengajar bagi guru-guru sekolah swasta.

Sistem ini tidak memberi keuntungan bagi perkembangan institusi pendidikan Islam. Bahkan dalam ordonansi yang dikeluarkan tahun 1932, dinyatakan bahwa semua sekolah yang tidak dibangun pemerintah atau tidak memperoleh subsidi dari pemerintah, diharuskan minta izin terlebih dahulu, sebelum sekolah itu didirikan. Dengan kebijakan ini pemerintah kolonial Belanda mendapat reaksi yang luar biasa dari kalangan umat Islam terlebih di Minangkabau. Hal ini karena umat Islam Minangkabau melihat adanya “sesuatu” yang akan merugikan Agama Islam jika kebijakan ini dilaksanakan.

Atas reaksi yang sedemikian besar, akhirnya pemerintahan Belanda melalui Gubernur Jendralnya memberi jawaban bahwa ordonansi guru di Minangkabau belum ada niat kapan untuk dilaksanakan. Lambat laun kebijakan ordonansi guru tidak jalan dan akhirnya kebijakan ini di batalkan dan hilang dari peredaran. Walaupun sebelum keputusan ini di buat sesungguhnya Belanda telah berusaha membujuk beberapa tokoh Islam Minangkabau untuk mendukung pelaksanaan ordonansi ini, namun mereka tidak berhasil (Ramayulis, 2011).

Di masa kolonial, pendidikan Islam hanya terbatas pada pesantren dan surau dan masih bersifat tradisional. Kemudian pada 1909 madrasah pertama di Indonesia muncul yaitu Madrasah Abadiyah di Kota Padang, Sumatera Barat, didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad. Setelah itu madrasah-madrasah lain pun tumbuh berdiri. Seperti Madrasah Shcoel yang didirikan pada 1910 di Kota Batu Sangkar, Sumatera Barat oleh Syekh M. Talib Umar. Lalu pada 1912 Muhammadiyah di Yogyakarta, didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan dkk dan mereka mulai membangun sistem lembaga pendidikan yang menggabungkan pendidikan Islam dan umum. Berturut-turut setelah itu pada 1913 ada Madrasah Al Irsyad di Jakarta, didirikan oleh Syekh Ahmad Sokarti. Kemudian pada 1915 muncul Diniyah Schoel di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, didirikan oleh Zainuddin Labai el Janusi.

Berikutnya pada 1926, salah satu organisasi Islam terbesar Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU) didirikan di Surabaya oleh K.H. Hasyim Asyari, K.H. Wahab Hasbullah dan setelah itu mulai banyak mendirikan madrasah sebagai embrio sejarah madrasah di Indonesia.

Madrasah berkembang di Jawa mulai 1912 saat berdirinya organisasi Muhammadiyah. lalu ada model madrasah pesantren NU dalam bentuk Madrasah Awaliyah, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Muallimin Wustha, dan Muallimin Ulya. Ada model AL-

Irsyad (1913) yang mendirikan Madrasah Tajhiziyah, Muallimin dan Tahassus, atau model Madrasah PUI di Jabar yang mengembangkan madrasah pertanian.

Belanda tentu saja resah akan perkembangan madrasah, lalu keluarlah peraturan yang menetapkan madrasah sebagai “sekolah liar”, kemudian mengeluarkan sejumlah peraturan yang melarang atau membatasi madrasah. Kalaupun kemudian Pemerintah Belanda memberikan apresiasi pada kepentingan Islam, bantuan diberikan 7.500 gulden untuk 50.000.000 jiwa. Menyimak pidato Oto Iskandardinata pada 1928 di Voolkraad, bantuan itu dianggap penghinaan karena seharusnya yang diberikan Belanda satu juta gulden.

Pada 1915 berdiri madrasah bagi kaum perempuan, yaitu Madrasah Diniyah putri yang didirikan Rangkayo Rahmah Al-Yunisiah. Zaiuniddin Labai ini juga yang pertama kali mendirikan Persatuan Guru-Guru Agama Islam (PGAI) di Minangkabau pada 1919 (<https://www.maassalamiyah.sch.id>).

Dari uraian di atas kita mendapatkan wawasan yang sangat menggembirakan bahwa pendidikan Islam dalam bentuk madrasah sudah sejak lama berdiri di nusantara bahkan sebelum republik ini berdiri tahun 1945, dapat pula dikatakan bahwa tokoh-tokoh pendiri madrasah adalah tokoh-tokoh ulama yang notabene adalah para pejuang kemerdekaan.

Pendidikan Islam Pada Masa Penjajahan Jepang

Jepang menjajah Indonesia setelah berhasil mengusir pemerintah Hindia Belanda dalam Perang Dunia II. Mereka menguasai Indonesia pada tahun 1942, dengan membawa semboyan: “Nippon Cahaya Asia.”

Setelah Jepang menancapkan cengkramannya di Nusantara ini yang awalnya datang dengan janji-janji manis sebagai “Saudara Tua Asia” belakangan ternyata berubah menjadi imperium baru. Awalnya Jepang mengambil kebijakan mengubah warna lembaga yang sebelumnya terbentuk di masa penjajahan Belanda. Beberapa kebijakan tersebut adalah:

1. Kantor Urusan Agama (KUA) yang pada zaman Belanda disebut *Voor Islamistische Saken* yang dipimpin oleh orang-orang orientalis Belanda, diubah oleh Jepang menjadi Kantor Sumubi yang dipimpin oleh ulama Islam sendiri yaitu KH. Hasyim Asy’ari dari Jombang, Jawa Timur.
2. Pondok-pondok pesantren besar sering mendapat kunjungan dan bantuan dari pembesar Jepang.
3. Pemerintah Jepang mengizinkan pembentukan barisan Hisbullah untuk memberikan latihan dasar kemiliteran bagi pemuda Islam.
4. Pemerintah Jepang juga mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh KH. Wahid Hasyim, Kahar Muzakir, dan Mohammad Hatta.
5. Para ulama Islam bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin nasionalis diizinkan membentuk barisan Pembela Tanah Air (PETA)

6. Umat Islam diizinkan meneruskan organisasi persatuan yang disebut Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) yang bersifat kemasyarakatan.

Maksud dari pemerintah Jepang menampakkan diri seakan-akan membela kepentingan Islam tidak lain hanyalah upaya Jepang menyusun kekuatan dari umat Islam dan nasionalis Indonesia agar dapat dibina demi kepentingan perang Asia Timur Raya yang dipimpin oleh Jepang. Dunia pendidikan yang seharusnya dikembangkan tetapi secara umum terbengkalai. Para siswa di sekolah tiap harinya hanya disuruh gerak badan, baris-berbaris, bekerja bakti (*romusha*), bernyanyi dan lain sebagainya. Mereka tidak mendapatkan pengajaran yang layak sebagaimana mestinya (Zuharini, 2011).

Adapun tujuan pendidikan masa penjajahan Jepang secara garis besar meliputi 2 hal pokok, yaitu untuk mempertebal akan keyakinan Islam itu sendiri dan mempertahankan hak-hak manusia dengan jalan politik atau perlawanan perang.

Tujuan pendidikan yang dicantumkan pada pendidikan Islam ketika zaman penjajahan Jepang antara lain:

1. I.N.S (*Indonesische Nederlanshe School*) dipelopori oleh Muhammad Syafi'i pada tahun 1899-1969, yang bertujuan mendidik anak agar berpikir rasional, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan membentuk manusia yang berwatak dan menanamkan persatuan.
2. Tujuan Nahdlatul Ulama, sebelum menjadi partai politik, memegang teguh empat mazhab, di samping mengerjakan apa-apa yang menjadi kemaslahatan umat Islam itu sendiri (Rohidin, 2004).

Ramayulis mengatakan bahwa, sikap penjajah Jepang terhadap pendidikan Islam ternyata lebih lunak, sehingga ruang gerak pendidikan lebih bebas ketimbang pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini memberikan kesempatan bagi pendidikan Islam untuk berkembang, diantaranya:

1. Pada masa awal pendudukan Jepang, madrasah berkembang dengan cepat terutama dari segi kuantitas. Hal ini dapat dilihat terutama di daerah Sumatra yang terkenal dengan madrasahnyanya, yang diilhami oleh majlis ulama tinggi.
2. Pendidikan agama di sekolah sekolah negeri diisi dengan pelajaran budi pekerti. Hal ini memberi kesempatan pada guru agama Islam untuk mengisinya dengan ajaran agama, dan di dalam pendidikan agama tersebut juga dimasukkan ajaran tentang jihad melawan penjajah.
3. Pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh KH. Wahid Hasyim, KH. Muzakkar, dan Bung Hatta.

Walaupun Jepang berusaha mendekati umat Islam dengan memberikan kebebasan dalam beragama dan dalam mengembangkan pendidikan namun para ulama tidak akan tunduk kepada pemerintahan Jepang, apabila mereka mengganggu akidah

umat. Hal ini kita dapat saksikan bagaimana perjuangan KH. Hasyim Asy'ari beserta kalangan santri menentang kebijakan yang merusak akidah dari Jepang yang memerintahkan untuk melakukan *seikerei* (menghormati kaisar Jepang yang dianggap keturunan dewa matahari). Akibat sikap tersebut beliau ditangkap dan dipenjarakan oleh Jepang selama 8 bulan.

Ramayulis juga menyimpulkan bahwa, meskipun dunia pendidikan secara umum terbengkalai, karena murid-muridnya sekolah setiap hari hanya disuruh gerak badan, baris-berbaris, kerja bakti, bernyanyi dan sebagainya. Yang agak beruntung adalah madrasah-madrasah yang ada di dalam lingkungan pondok pesantren yang bebas dari pengawasan langsung pemerintah pendudukan Jepang. Pendidikan dalam pondok pesantren masih dapat berjalan secara wajar.

Ada satu hal yang melemahkan dari aspek pendidikan yang diterapkan Jepang yakni penerapan sistem pendidikan militer. Sistem pengajaran dan kurikulum disesuaikan untuk kepentingan perang. Siswa memiliki kewajiban mengikuti latihan dasar kemiliteran dan harus mampu menghafal lagu kebangsaan Jepang. Begitu pula dengan para gurunya, diwajibkan untuk menggunakan bahasa Jepang dan Indonesia sebagai pengantar di sekolah menggantikan bahasa Belanda. Untuk itu para guru wajib mengikuti kursus bahasa Jepang yang diadakan oleh pemerintah Jepang.

Dengan demikian sistem pendidikan yang diterapkan Jepang di Indonesia memiliki kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan sistem pendidikan yang diterapkan masa penjajahan Belanda yang bersifat lebih liberal namun terbatas untuk kalangan tertentu saja, sementara pada masa Jepang konsep diskriminasi tidak ada tetapi terjadi penurunan kualitas secara drastis baik dari sisi keilmuan maupun mutu murid dan guru. Kondisi ini tidak terlepas dari target pemerintah Jepang melalui pendidikan, Jepang bermaksud mencetak kader-kader yang akan memelopori dan mewujudkan konsep kemakmuran bersama Asia Timur Raya yang diimpi-impikan Jepang.

Satu hal yang menarik untuk dicermati adalah adanya pemaksaan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang agar masyarakat Indonesia terbiasa melakukan penghormatan kepada Tenno (Kaisar) yang dipercayai sebagai keturunan dewa matahari (*Omikami*). Sistem penghormatan kepada Kaisar dengan cara membungkukkan badan menghadap Tenno, disebut dengan *Seikeirei*. Penghormatan *Seikerei* ini, biasanya diikuti dengan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang (*kimigayo*). Tidak semua rakyat Indonesia dapat menerima kebiasaan ini, khususnya dari kalangan Agama. Penerapan *Seikerei* ini ditentang umat Islam, salah satunya perlawanan yang dilakukan KH. Zainal Mustafa, seorang pemimpin pondok pesantren Sukamanah Jawa Barat. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Singaparna (Hasbullah, 1996).

Perkembangan Pendidikan Islam Pada Masa Jepang
(<https://www.studocu.com/id>)

1. Madrasah

Awal pendudukan Jepang, madrasah berkembang dengan cepat terutama dari segi kuantitas. Hal ini dapat dilihat terutama di daerah Sumatra yang terkenal dengan madrasah awaliyahnya, yang diilhami oleh majlis ulama tinggi.

2. Pendidikan Agama di Sekolah

Sekolah negeri diisi dengan pelajaran budi pekerti. Hal ini memberi kesempatan pada guru agama Islam untuk mengisinya dengan ajaran agama, dan di dalam pendidikan agama tersebut juga di masukan ajaran tentang jihad melawan penjajah

3. Perguruan Tinggi Islam

Pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta yang oleh KH. Wahid Hasyim, KH. Muzakkar, dan Bung Hatta. Walaupun Jepang berusaha mendekati umat Islam dengan memberikan kebebasan dalam beragama dan dalam mengembangkan pendidikan namun para ulama tidak akan tunduk kepada pemerintahan Jepang, apabila mereka mengganggu akidah umat hal ini kita dapat saksikan bagaimana masa Jepang ini perjuangan KH. Hasyim Asy'ari beserta kalangan santri menentang kebijakan kufur Jepang yang memerintahkan untuk melakukan *seikerei* (menghormati kaisar Jepang yang dianggap keturunan dewa matahari). Akibat sikap tersebut beliau ditangkap dan dipenjarakan oleh Jepang selama 8 bulan. Ramayulis juga menyimpulkan bahwa, meskipun dunia pendidikan secara umum terbengkalai, karena murid-muridnya sekolah setiap hari hanya disuruh gerak badan, baris-berbaris, kerja bakti (*romusha*), bernyayi dan sebagainya. Yang agak beruntung adalah madrasah-madrasah yang ada di dalam lingkungan pondok pesantren yang bebas dari pengawasan langsung pemerintah pendudukan Jepang. Pendidikan dalam pondok pesantren masih dapat berjalan secara wajar.

KESIMPULAN

Dari uraian makalah di atas, dapat dipahami intisari dari pendidikan Islam masa pendudukan Belanda dan Jepang, bahwa Pendidikan pada Islam masa penjajahan Belanda di Indonesia, pemerintah kolonial Belanda sangat membatasi aktivitas madrasah dan guru yang mengajar di madrasah. Mereka melakukan itu karena perasaan takut terhadap Umat Islam yang sudah mulai berkembang. Sementara pada saat Jepang berkuasa pendidikan Islam sedikit lebih bebas ketimbang pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Akan tetapi Jepang dengan misinya, mewajibkan guru untuk belajar bahasa Jepang dalam memberikan pelajaran dan mengganti bahasa Belanda menjadi bahasa Indonesia, termasuk mewajibkan hormat kepada Tenno (Kaisar). Inilah yang oleh tokoh Islam tidak diterima akhirnya mereka ditangkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah Amir, Wirjosukrto. *Pembaharuan Pendidikan dan Pengajaran Islam*, cet. Iv. Jember: Muria Offset, 1985.
- Hasbullah. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo

<http://nieez-azza.blogspot.com/2012/05/makalah-pendidikan-islam-pada->
<http://our-ed.blogspot.com/2012/05/pendidikan-di-zaman-penjajahan-jepang.html>
 diunduh unduh tanggal 30 juni 2023 pkl. 06:10.
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/viewFile/5021/3343>
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/viewFile/5021/3343>
<https://www.maassalamiyah.sch.id/blog/quicquid-enima-sapientia-proficiscitur-idconti-copy/>
 Jalaluddin. *Kapita Selekta Pendidikan*. Jakarta: Kalam Mulia, 1990
 masa.html, di unduh tanggal 30 juni 2023 pkl. 06:00.
 Najamuddin. *Perjalanan Pendidikan di Tanah Air (Tahun 1800-1945)*, Hak Cipta: Jakarta, 2004
 Nasution, Harun. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan Nizar, 1992
 Persada, 1996.
 Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, . 2011
 Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2011
 Samsul (ed). *Sejarah Pendidikan Islam “Menelusuri Sejarah Pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008
 Shaleh, Abdul Rahman, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa “Visi, Misi dan Aksi,”* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
 Steenbrink, A Karel, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984
 Subhan, Arief. *Lembaga Pendidikan Islam Abad Ke-20 “Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas*. Jakarta: Kencana, 2012.
 Wahab, Rohidin FZh, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2004
 Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hadikarya, 1985
 Zuhairini, dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
 Aslan. (2017). Kurikulum Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). *Jurnal Studia Insania*, 5(2), 105–119. <https://doi.org/10.18592/jsi.v5i2.1358>
 Aslan, A. (2016). Kurikulum Pendidikan Vs Kurikulum Sinetron. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 14(2), 135–148.
 Aslan, A. (2019). *HIDDEN CURRICULUM*. Pena Indis.
 Aslan, Hifza, Syakhrani, A. W., Syafruddin, R., & Putri, H. (2020). CURRICULUM AS CULTURAL ACCULTURATION. *Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan, Dan Humaniora)*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.36526/santhet.v4i1.860>
 Hendriarto, P., Mursidi, A., Kalbuana, N., Aini, N., & Aslan, A. (2021). Understanding the Implications of Research Skills Development Framework for Indonesian Academic Outcomes Improvement. *Jurnal Iqra’ : Kajian Ilmu Pendidikan*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.25217/ji.v6i2.1405>
 Hutagaluh, O., Aslan, Putra, P., Syakhrani, A. W., & Mulyono, S. (2020). SITUATIONAL LEADERSHIP ON ISLAMIC EDUCATION. *IJGIE : International Journal of Graduate of Islamic Education*, 1(1), Article 1.
 Nugraha, M. S., Liow, R., & Evly, F. (2021). The Identification of Online Strategy Learning Results While Students Learn from Home During the Disruption of the COVID-19 Pandemic in Indonesia. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27(2), 1950–1956.

Sudarmo, S., Arifin, A., Pattiasina, P. J., Wirawan, V., & Aslan, A. (2021). The Future of Instruction Media in Indonesian Education: Systematic Review. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 13(2), Article 2. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v13i2.542>